

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penilaian pembangunan manusia sangat penting dilakukan disetiap negara, terutama negara berkembang seperti Indonesia dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia sebagai indikator penilainya. Bertumbuhnya perekonomian di suatu negara tidak bisa menjamin bahwa negara tersebut tidak memiliki tingkat kesenjangan yang tinggi, sehingga sangat diperlukan dalam melihat tingkat Indeks Pembangunan Manusia. Indeks pembanguana manusia merupakan indeks komposit yang berdasarkan tiga indikator dasar seperti, pendidikan yang di ukur dari kemampuan baca tulis orang dewasa dan rata-rata lama sekolah, kesehatan yang diukur dari angka usia harapan hidup, dan daya jual beli (Dewi & Sutrisna, 2014).

Pembangunan manusia di provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami kenaikan yang cukup baik dari tahun 2011 sebesar 62,14 mnjadi 68,14 pada tahun 2019 dengan kenaikan yang telah dicapai sebesar 6 dan status capain IPM sedang.

**Tabel 1. 1 IPM di NTB dan Nasional**

| No | Tahun | NTB   | Nasional |
|----|-------|-------|----------|
| 1. | 2011  | 62,14 | 67,09    |
| 2. | 2012  | 62,98 | 67,70    |
| 3. | 2013  | 63,76 | 68,31    |
| 4. | 2014  | 64,31 | 68,90    |
| 5. | 2015  | 65,19 | 69,55    |
| 6. | 2016  | 65,81 | 70,18    |
| 7. | 2017  | 66,58 | 70,81    |
| 8. | 2018  | 67,30 | 71,39    |
| 9. | 2019  | 68,14 | 71,92    |

**Sumber :BPS Provinsi NTB**

Melihat dari selisih IPM NTB dengan IPM nasional pada tahun 2011 memiliki jarak yang cukup lebar sebesar 4,59 poin, tetapi seiring berjalannya waktu jarak antar IPM NTB dengan nasional semakin menipis yaitu sebesar 3,78 poin pada tahun 2019. Artinya NTB tiap tahunnya melakukan pembenahan atau perbaikan untuk mengejar ketinggalan pembangunan manusia agar bisa sejajar dengan capaian nasional (Statistik, 2019b)

Pembangunan manusia yang semakin membaik tidak terlepas dari perbaikan akses untuk memperoleh pelayanan baik itu pendidikan maupun kesehatan serta akses untuk memperoleh pendapatan yang lebih besar. Dalam bidang pendidikan, semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan minimal selama sembilan tahun, ini sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM 2015–2019).

**Tabel 1. 2 HLS dan RLS di NTB**

| No | Tahun | Harapan Lama Sekolah | Rata Lama Sekolah |
|----|-------|----------------------|-------------------|
| 1. | 2011  | 11,97                | 6,07              |
| 2. | 2012  | 12,21                | 6,33              |
| 3. | 2013  | 12,46                | 6,54              |
| 4. | 2014  | 12,73                | 6,67              |
| 5. | 2015  | 13,04                | 6,71              |
| 6. | 2016  | 13,16                | 6,79              |
| 7. | 2017  | 13,46                | 6,90              |
| 8. | 2018  | 13,47                | 7,03              |
| 9. | 2019  | 13,48                | 7,27              |

**Sumber :BPS Provinsi NTB**

Data rata-rata lama sekolah di NTB mengalami kenaikan yang cukup baik, dimana pada tahun 2011 RLS penduduk usia 25 tahun ke atas di provinsi hanya 6,07 yang berarti sudah tamat sekolah dasar. Pada tahun 2019 terjadi kenaikan RLS sebesar 7,27 tahun artinya penduduk usia 25 tahun ke atas rata-rata telah menempuh pendidikan sampai tingkat SMP/ sederajat kelas VII. Rata rata laju pertumbuhan RLS pada provinsi NTB mencapai 2,68 persen per tahun dengan rentang waktu 2011 sampai 2019. Peningkatan RLS harus dilakukan dengan menjaga penduduk usia 25 ke atas untuk menyelesaikan pendidikan sampai perguruan tinggi. Sehingga angka RLS nya meningkat secara signifikan, artinya angka putus sekolah harus ditekan dengan cara masyarakat yang sudah atau sedang bersekolah diberikan pemahaman untuk melanjutkan pendidikannya supaya tingkat intelektualitas dan ketarampilannya semakin meningkat (Statistik, 2019b).

**Tabel 1. 3 AHH di Provinsi NTB dan Nasional**

| No | Tahun | NTB   | Nasional |
|----|-------|-------|----------|
| 1. | 2011  | 64,13 | 70,01    |
| 2. | 2012  | 64,43 | 70,20    |
| 3. | 2013  | 64,74 | 70,40    |
| 4. | 2014  | 64,89 | 70,59    |
| 5. | 2015  | 65,38 | 70,78    |
| 6. | 2016  | 65,48 | 70,90    |
| 7. | 2017  | 65,55 | 71,06    |
| 8. | 2018  | 65,87 | 71,20    |
| 9. | 2019  | 66,28 | 71,34    |

**Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi NTB**

Bidang kesehatan yang perlu diperhatikan terutama angka harapan hidup, dimana pada tahun 2019 angka harapan hidup hingga berusia 66,28 tahun, artinya penduduk NTB yang lahir pada tahun 2019 memiliki harapan hidup selama 66 tahun 3 bulan. Angka harapan hidup di NTB tertinggal jauh dengan angka harapan hidup nasional, dimana pada tahun 2019 angka harapan hidup nasional sebesar 71,34 tahun. Kebijakan kesehatan memiliki efek yang panjang, untuk itu walaupun pergerakan di NTB cukup lambat tetapi perkembangan yang diperoleh cukup baik. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu faktor yang dapat melihat kinerja perekonomian baik nasional maupun regional (daerah), pertumbuhan ekonomi di dasarkan atas kenaikan output agregat atau keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian (Maulana & Bowo, 2013).

Secara umum peningkatan PDRB menjadi indikator keberhasilan pembangunan daerah yang dapat dikategorikan dalam berbagai sektor ekonomi, seperti pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas

dan air bersih, bangunan, perdagangan, perhotelan dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan sektor jasa lainnya. Dengan semakin besarnya sumbangan PDRB diberikan ke daerah maka pertumbuhan daerah tersebut makin membaik, dan akan mempengaruhi pembangunan manusia di daerah tersebut.

Perekonomian NTB diukur berdasarkan produk domestik bruto atas dasar harga berlaku di triwulan III-2019 mencapai Rp.3,99 triliun dan atas dasar konstan berlaku 2010 mencapai Rp.23,93 triliun. Ekonomi di triwulan III-2019 dibandingkan dengan triwulan III-2018 tumbuh sebesar 6,26 persen (y on y). Dalam produksi, tumbuhan paling tinggi dicapai kategori konstruksi sebesar 29,41 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, komponen ekspor luar negeri mengalami pertumbuhan yang tinggi sebesar 16,24 persen (Statistik, 2019a).

**Tabel 1. 4 PDRB Menurut Pengeluaran 2019**

| No | Komponen              | ADH Konstan (Juta Rp) |                   | Pertumbuhan (Persen) Triwulan III-2019 |        |        | Sumber Pertumbuhan Triwulan III-2019 |        |        |
|----|-----------------------|-----------------------|-------------------|--|--------|--------|--------------------------------------|--------|--------|
|    |                       | Triwulan II-2019      | Triwulan III-2019 | q-to-q                                 | y-on-y | c-to-c | q-to-q                               | y-on-y | c-to-c |
| 1. | Konsumsi Rumah Tangga | 14.625.067,22         | 14.621.743,16     | -0,02                                  | 3,57   | 3,18   | -0,01                                | 2,23   | 1,99   |
| 2. | Konsumsi LNPRT        | 389.899,58            | 390.407,92        | 0,13                                   | 2,53   | 8,23   | 0,00                                 | 0,04   | 0,13   |
| 3. | Konsumsi Pemerintah   | 3.160.896,72          | 3.130.031,32      | -0,98                                  | 7,19   | 6,09   | -0,13                                | 0,93   | 0,78   |
| 4. | PMBT                  | 7.908.805,50          | 8.125.206,66      | 2,74                                   | 10,64  | 8,63   | 0,92                                 | 3,47   | 2,79   |
| 5. | Perubahan Inventori   | 73.118,12             | 71.995,66         | -1,54                                  | -4,22  | -15,13 | 0,00                                 | -0,01  | -0,06  |

|             |                         |                      |                      |             |             |             |             |             |             |
|-------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 6.          | Ekspor Luar Negeri      | 942.854,75           | 1.095.942,51         | 16,24       | -30,50      | -46,12      | 0,65        | -2,14       | -3,38       |
| 7.          | Impor Luar Negeri       | 521.208,72           | 677.322,58           | 29,95       | -32,10      | -23,91      | 0,66        | -1,42       | -0,90       |
| 8.          | Net Ekspor Antar Daerah | -2.982.870,39        | -2.825.609,04        | -5,27       | -2,38       | -6,98       | 0,67        | 0,31        | 1,00        |
| <b>PDRB</b> |                         | <b>23.596.562,78</b> | <b>23.932.395,60</b> | <b>1,42</b> | <b>6,26</b> | <b>3,70</b> | <b>1,42</b> | <b>6,26</b> | <b>3,70</b> |

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi NTB

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dirasakan oleh setiap daerah, disebabkan oleh kurangnya pendapatan atau asset untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti makanan, rumah, kesehatan dan pendidikan. Sehingga kemiskinan sangat mempengaruhi pembangunan manusia (Widodo et al., 2019)

Jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat pada bulan september 2019 sebanyak 705,68 ribu sedangkan pada bulan maret 2019 sebesar 735, 96 ribu orang atau berkurang sebesar 30,3 ribu orang. Persentase penduduk miskin periode maret 2019- september 2019 mengalami penurunan sebesar 0,68 persen yang awalnya sebesar 14,56 persen menjadi 13,88 persen. Artinya perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami penurunan namun masih bersifat fluktuatif (Statistik, 2020)

**Tabel 1. 5 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin**

| <b>Daerah/ Tahun</b> | <b>Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)</b> | <b>Persentase Penduduk Miskin</b> |
|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Perkotaan</b>     |                                      |                                   |
| Maret 2019           | 384,65                               | 15,74                             |
| September 2019       | 365,05                               | 14,85                             |
| <b>Perdesaan</b>     |                                      |                                   |
| Maret 2019           | 351,31                               | 13,45                             |
| September 2019       | 340,63                               | 12,97                             |
| <b>Kota dan Desa</b> |                                      |                                   |
| Maret 2019           | 735,96                               | 14,56                             |
| September 2019       | 705,68                               | 13,88                             |

**Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi NTB**

Faktor Faktor yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua (Ina Azizah Kadri, Made Susilawati dan Kartika Sari 2020). Pada penelitian ini menggunakan metode Geographically Weighted Regression (GWR), metode ini digunakan karena adanya masalah special yang disebabkan adanya perbedaan karakteristik antar wilayah. Variabel dependennya adalah indeks pembangunan manusia (IPM) dan variabel independennya adalah rata lama sekolah (RLS) dan angka harapan hidup (AHH), hasil dari penelitian variabel rata lama sekolah dan angka harapan hidup memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM).

Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia Periode 2008 – 2012 (Nadia Ayu Bhakti, Istiqomah, Suprpto 2014). Pada penelitian ini menggunakan model regresi data panel, dimana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan variabel dependen dan PDRB sebagai variabel independen. Hasil penelitian PDRB memiliki hubungan positif dan

signifikan terhadap IPM.

Analisis Indeks Pembangunan Pada 5 Wilayah Hasil Pemekaran di Jawa Barat (Peggy Hariawan). Pada penelitian ini digunakan metode kuantitatif panel dengan variabel dependen adalah indeks pembangunan manusia (IPM) dan variabel independennya adalah PDRB dan kemiskinan . Hasil yang didapatkan pada penelitian ini PDRB memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM), sedangkan pada variabel kemiskinan memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM).

Beberapa pembahasan terkait faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi pembangunan manusia, kewajiban negara ialah melindungi hak-hak manusia baik menurut syariat maupun hukum. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bagaimana islam mengadakan keseimbangan agar terciptanya kesejahteraan di negara tersebut.

وَادِّقَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ  
مِنْهُمْ يَا اللَّهُ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَصْطَرَّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ  
وَيُنْسِ الْمَصِيئِ

Artinya:”Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman: "Dan kepada orang yang kafirpun Aku beri kesenangan sementara, kemudian Aku paksa ia menjalani siksa neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali". (QS.Al-Baqarah/2:126).

Ayat ini merupakan doa dari Nabi Ibrahim AS untuk menjadikan negeri yang ditempati orang beriman (kepada Allah dan hari kemudian) sebagai negeri yang



aman sentosa, yang dicukupkan limpahan rezki tidak hanya bagi penduduk yang beriman, namun juga termasuk yang kafir (sebagai kesenangan sementara). Ayat ini mengisyaratkan seakan keamanan dan kesejahteraan ini bukan hanya milik umat Islam, namun dalam konteks bernegara merupakan hak setiap orang sebagai hak dasar (asasi).

Alasan penulis ingin melakukan penelitian ini dikarenakan melihat tingkat IPM di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang masih berada di level sedang atau belum bisa melewati angka nasional. Maka dari itu, penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembahasan dari latar belakang sebelumnya, maka di peroleh beberapa permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini :

1. Bagaimana pengaruh Rata-rata Lama Sekolah (RLS) terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Nusa Tenggara Barat?
2. Bagaimana pengaruh Angka Harapan Hidup (AHH) terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat?
3. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Nusa Tenggara Barat
4. Bagaiman pengaruh Persentase Jumlah Penduduk Miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Nusa Tenggara Barat

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis apakah rata lama sekolah (RLS) mempengaruhi indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Untuk menganalisis apakah angka harapan hidup (AHH) mempengaruhi indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Untuk menganalisis apakah produk domestik regional bruto (PDRB) mempengaruhi indeks pembangunan manusia (IPM) di provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Untuk menganalisis apakah persentase jumlah penduduk miskin mempengaruhi indeks pembangunan manusia (IPM) di provinsi Nusa Tenggara Barat.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya atau memiliki kepentingan dengan permasalahan pada penelitian ini, yaitu:

#### **1. Bagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan manfaat mengenai pembahasan di dalam penelitian ini, sehingga dapat dijadikan sebagai perbandingan antara teori dan realita selama duduk di bangku perkuliahan.

#### **2. Bagi Mahasiswa**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan atau bahan masukan bagi pembaca mengenai faktor- faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi bagaimana kondisi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

4. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi penambahan sumbangan pemikiran dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk mengambil kebijakan kedepannya khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat

